

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anggaran memiliki peran yang cukup vital dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk menggerakkan pembangunan sosial, ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di bidang kesehatan. Laju pembangunan serta aktifnya jaminan kesehatan di suatu daerah dapat dilihat dari efektifitas manajemen keuangan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Sebaliknya, pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas mencerminkan perencanaan daerah yang relatif lemah dan dapat menyebabkan pembangunan suatu daerah menjadi terhambat. Anggaran kesehatan masyarakat lebih diutamakan untuk saat ini. .

Anggaran salah satu kekuatan penting bagi pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dan mewujudkan harapan masyarakat dalam kondisi seperti saat ini. Anggaran merupakan alat koordinasi, komunikasi, dan valuasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada periode tertentu dalam bentuk keuangan, Mardhiana (2018). Dikutip dari *CNNIndonesia.com* Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 695,2 Triliun. Anggaran

tersebut digunakan untuk bantuan alat kesehatan, bantuan alokasi sosial masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini sering kali pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan matriks kebutuhan masyarakat. Pada situasi seperti ini terkadang penggunaan anggaran ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, sehingga belum dapat dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat daerah. Hal ini tentu harus dicermati oleh beberapa pihak sehingga dalam penyusunan anggaran hingga pengalokasian anggaran dapat tepat sasaran sehingga suatu organisasi dapat mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT melarang manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun seseorang bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat boleh-boleh mengambil hak orang, seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan Janganlah (kamu) makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan data dari TribunJogja.com dan KrJogja.com pada Bulan April Pemerintah Kabupaten Sleman menganggarkan Rp 105 Miliar untuk Pengendalian dan Penanganan kesehatan, sudah terealisasi Rp80 miliar. Pada Bulan Mei Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sleman Ramelan mengatakan, Pemkab Sleman telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 52 miliar untuk penanganan kesehatan masyarakat ini. Dengan rincian Rp 30 miliar untuk pemberian jaidup kepada warga terdampak dan Rp 22 miliar untuk bidang kesehatan, tetapi belum di realisasikan sehingga Banggar DPRD Kabupaten Sleman mendesak agar segera direalisasikan.

Di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam mengelola JPS dan belanja alat kesehatan, misalnya mengenai harga beli dan jumlah alat uji yang telah didistribusikan, harga beli dan pemasok Alat Material Kesehatan (AMK), dan harga beli serta jumlah bahan baku obat dan tablet obat yang telah didistribusikan. Transparansi merupakan kemampuan melihat, menganalisi apa yang terjadi di sektor pemerintahan (Janssen et al. 2017). Melihat tingginya potensi penyalahgunaan belanja alat kesehatan dan distribusi JPS, ICW bersama Perkumpulan IDEA Yogyakarta membuka posko pengaduan warga terhadap dugaan penyalahgunaan penyaluran. Beberapa aduan yang diterima yakni mengenai dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji, AMK, dan obat, informasi mengenai alat uji, AMK, dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk, penyalahgunaan bansos meliputi politisasi tidak tepat sasaran (khususnya mengenai exclusion error, di mana terdapat warga yang dinilai tidak layak

menerima JPS atau tidak rentan terkena resiko sosial namun menerima JPS), pemotongan dan pungli, pemberian fiktif, pemberian dobel (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama), serta mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako. Pengaduan dari warga tersebut akan dianalisis lebih dulu untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing, (TRIBUNJOGJA.COM).

Menurut Syahrir, (2017) pembahasan tentang budgetary slack dimulai dari pendekatan teori keagenan. Dalam perspektif teori keagenan praktik senjangan anggaran muncul karena adanya konflik kepentingan antara principal dan agen untuk mempertahankan reputasi dan mencapai apa yang mereka inginkan. Selain itu budgetary slack terjadi karena adanya perbedaan potensi pendapatan dengan target anggaran. Perbedaan target anggaran mengindikasikan terjadi perilaku seseorang untuk merendahkan target pendapatan untuk memudahkan pencapaian anggaran pemerintah daerah, Rahim, (2019).

Pada situasi saat ini pemerintah lebih mengutamakan melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan alat kesehatan, bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi hal ini harus di perhatikan apakah anggaran yang dikeluarkan untuk realokasi sesuai dengan yang ditetapkan dan diharapkan. Selain dari sisi anggaran, saat ini kinerja pejabat/pegawai SKPD juga perlu

diperhatikan, pada variabel ketidakpastian lingkungan pejabat/pegawai SKPD saat ini mungkin disibukkan dengan peranan tugas baru sehingga mereka tidak fokus terhadap tupoksi/tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Praktik anggaran seringkali di desentralisasi dengan tujuan untuk menyediakan operasi unit organisasi dengan lebih banyak otonomi untuk pengambilan keputusan (Mkasiwa 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Yanti dan Sari (2016) yang menguji Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Senjangan Anggaran Kabupaten Tabanan. Dari penelitian sebelumnya termasuk banyak membahas judul yang peneliti gunakan dan memberikan saran untuk menambahkan variabel atau metode lain, peneliti menambahkan variabel transparansi pengelolaan anggaran, ketidakpastian lingkungan, dan budaya organisasi. Dengan alasan tersebut, sehingga sangat penting peneliti mengangkat Judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Transparansi Pengelolaan Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Budgetary Slack Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Survey Pada SKPD Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman?

2. Apakah Transparansi pengelolaan Anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman?
4. Apakah budaya organisasi memperkuat hubungan partisipasi anggaran dengan budgetary slack?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dengan budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji pengaruh Transparansi pengelolaan Anggaran daerah dengan budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan dengan budgetary slack pada SKPD Kabupaten Sleman.
4. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi dengan partisipasi anggaran pada SKPD Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam organisasi pemerintahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam membahas anggaran untuk penanganan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Partisipasi Anggaran, Transparansi Pengelolaan Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Budgetary Slack Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating.

2. Manfaat Praktis

Bagi Instansi Pemerintah Daerah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menyusun anggaran sehingga dapat meminimalkan selisih terhadap anggaran dan menciptakan anggaran yang efektif.